

Urgensi Akreditasi Sekolah dalam Upaya Pemetaan Mutu Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Amirulah Datuk¹, Arifin², ST. Ramlah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia

Corresponding Author ✉ amirulahdatodawa@gmail.com

ABSTRACT

Education is the belle of national development to foster a strong national character and is based on Indonesian values or culture. School productivity is very important and something that is non-negotiable. The characteristics of a productive school can be seen from the form and nature of the school organization which can provide opportunities in the form of increasing the number and quality of abilities possessed by students after participating in learning. School accreditation is an activity for assessing the eligibility of a school based on predetermined criteria and carried out by the National Accreditation Board for Schools/Madrasahs (BAN-S/M), the results of which are manifested in the form of recognition of eligibility ratings. This activity aims to obtain an overview of school performance that can be used as a tool for fostering, developing and improving the quality of education. also to determine the feasibility level of a school in the provision of education. In implementing school accreditation, it is an effort by the government to guarantee the quality of education and improve school performance, especially in providing educational services to the community. School Accreditation aims to provide information on the eligibility of the school or program it implements based on the National Education Standards, provide recognition for eligibility ratings, and provide recommendations regarding education quality assurance to programs and or educational units that are accredited. In terms of quality, education in NTT is still in the 29th position out of 34 provinces. This illustrates that mapping in the accreditation system is important in recording the number of schools spread across the beloved Flobamorata region based on Graduate Quality, Learning Process, Teacher Quality and School Management. In order to evaluate school performance so that it can be useful to improve the quality of education in NTT.

Keywords: *Educational Quality Mapping, Urgency of School Accreditation, Educational Quality*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

November 27,
2022

Revised

December 29,
2022

Accepted

January 01,
2023

Journal Homepage <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Semula, risalah ini hendak mengemukakan urgensi pentingnya mutu sebuah lembaga pendidikan ditengah pandemic Covid 19 melanda dan meminta banyak orang untuk turut berpikir dalam tata kelola yang sistimatis, terukur dan terorganisir untuk bagaiman pesertadidik dapat belajar baik secara daring maupun tatap muka langsung. Peran pendidikan dapat dipahami bukan hanya dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pembelajaran dirunag-ruang kelas) melainkan juga dalam konteks makro yaitu kepentingan masyarakat luas, dimana

satuan pendidikan (sekolah) mampu didesain dengan baik dalam memfasilitasi semua anak untuk mendapatkan pembelajaran yang layak dan berkeadilan.

Dalam hal ini argumentasi pembelajaran mikro harus mampu memberikan layanan belajar mengajar kepada anak didik sesuai dengan kebutuhannya. Satuan pendidikan harus mampu memberikan serfis pelayanan dengan memperhatikan keragaman karakteristik individual peserta didik. Sedangkan dalam konteks makro, pendidikan harus mampu merealisasikan relevansi anantara hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi pendidikan dapat diupayakan dengan memperhitungkan dan mengantisipasi tuntutan dan harapan masyarakat seiring dengan laju perkembangan social, ekonomi, dan politik. Upaya tersebut menuntut para penyelenggara pendidikan harus memiliki cara pandang komprehensif terhadap berbagai isu perkembangan yang ada, dan berkemampuan menggali potensi sumber daya pendidikan secara terpadu. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Pendidikan berperan penting dalam penyampaian informasi keilmuan yang akan menjadikan masyarakat mengetahui, mengerti, memahami, dan memiliki wawasan yang semakin luas. Selain itu pendidikan juga membangkitkan motivasi untuk masyarakat agar dapat bergerak maju memacu dan bangkit dari keterbelakangan, (Datuk, 2020)

Disinilah terlihat nampak jelas bahwa Pendidikan berfungsi majemuk terutama dalam membangun anak bangsa yang lebih bermutu. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab II pasal 3 tentang Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. "Pendidikan menjadi primadona pembangunan nasional untuk membina karakter bangsa yang tangguh dan dilandasi nilai-nilai atau budaya Pancasila". Institusi yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah sekolah. Dewasa ini, harapan masyarakat terhadap sekolah mengalami perubahan ke arah perhatian mereka pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai institusi pencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berkualitas harus bekerja secara efektif dan efisien sebagai kriteria produktivitas suatu organisasi. "Pendidikan menjadi primadona pembangunan nasional untuk membina karakter bangsa yang tangguh dan dilandasi nilai-nilai atau budaya Pancasila". Institusi yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah sekolah. Dewasa ini, harapan masyarakat terhadap sekolah mengalami perubahan ke arah perhatian mereka pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai institusi pencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berkualitas harus bekerja secara efektif dan efisien sebagai kriteria produktivitas suatu organisasi, (Asopwan, 2018).

Produktivitas sekolah menjadi sangat penting dan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karakteristik sekolah yang produktif dapat dilihat dari bentuk dan sifat organisasi sekolah yang dapat memberikan peluang berupa peningkatan jumlah dan kualitas kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, (Mulyasa, 2011). Sekolah produktif yang menjadi misi sekolah di antaranya

prestasi yang tinggi dan suasana yang menyenangkan. Prestasi dapat dilihat dari sudut lulusan yang banyak, berkualitas tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Produktivitas sekolah yang baik tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi sekolah, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, motivasi kerja guru, lingkungan sekolah yang kondusif, pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang rutin, akreditasi sekolah, dan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah dan serta daya dukung berupa saran dan prsarana sekolah, (Soetjipto, 2004)). Dari beberapa faktor tersebut, penulis memandang faktor akreditasi sekolah merupakan salah satu faktor yang dominan penting untuk diketahui bersama. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan akreditasi sekolah mencakup berbagai bidang penilaian, yakni kurikulum dan proses belajar-mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, peserta didik, peran serta masyarakat dan kultur sekolah. Karena mencakup berbagai komponen itulah maka keberadaan akreditasi sekolah merupakan salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas sekolah.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional yang lebih baik, maka di tahun 2019 BAN S/M telah menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun perangkat akreditasi yang baru, atau disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020). Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan dikembangkan dengan menitikbertakan pada 4 komponen penilaian yaitu, Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru dan Manajemen Sekolah. Penyusunan akreditasi baru ini untuk memenuhi kebutuhan berdasar pada dinamika dunia pendidikan saat ini yang telah mengalami banyak perubahan. Argumentasi mendasar atas perubahan ini adalah BAN S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilain akreditasi sekolah dari penilaian berbasis administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (Performance based). Pergeseran pradigama ini, mutlak diperlukan sebagai penting untuk melihat mutu pendidikan kea rah yang lebih baik yang difokuskan pada pemenuhan mutu yang lebih subtatntif.

Sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu (1). Mutu pendidikan adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (review) mutu (2). Kegiatan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holder (Saad, 2020). Dalam kaitannya dengan standarisasi, akreditasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperoleh informasi tentang kondisi nyata suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar minimal yang telah ditetapkan menuju perencanaan pendidikan yang terarah guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Akreditasi merupakan suatu bentuk usaha mempercepat dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sekolah. Tidak hanya itu, akreditasi juga dapat memotivasi sekolah untuk berlomba-lomba berbenah diri dalam rangka mencapai standart yang diinginkan bahkan melebihi atau melampaui dari standar yang ada.

Penilaian mutu sekolah sama halnya dengan melakukan evaluasi mutu sekolah yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip dan standar-standar tertentu, salah satunya dengan akreditasi. Akreditasi sekolah, menurut Undang-Undang Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan faktor yang strategis untuk menentukan bahwa satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah memiliki kelayakan program dalam melaksanakan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Adanya kegiatan akreditasi diharapkan dapat memberikan arahan dan motivasi kepada satuan Pendidikan untuk melakukan dan meningkatkan penjaminan mutu secara berkesinambungan. Selain itu, akreditasi juga dapat memberikan informasi mengenai mutu sekolah maupun madrasah terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan yang mengacu pada pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian maka proses akreditasi seharusnya dilakukan secara profesional, akuntabel, dan kredibel mengacu pada prinsip yang telah ditetapkan yakni obyektif, komprehensif, adil, dan transparan.

Pada pelaksanaannya, kegiatan akreditasi mensyaratkan adanya validasi kondisi sekolah yang sebenarnya sehingga memastikan bahwa sekolah yang akan diakreditasi telah sesuai dengan dan memenuhi persyaratan (compliance) minimal untuk memastikan bahwa sekolah yang bersangkutan telah memenuhi kelayakan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Untuk meningkatkan nilai akreditasi, persyaratannya tidak terbatas pada ketersediaan input, sarana, prasarana dan sebagainya, (Awaludin, 2017). Selain itu, budaya sekolah (school culture), lingkungan sekolah (school environment), manajemen sekolah (school management) juga perlu mendapat perhatian karena faktor ini juga sangat mempengaruhi adanya penyediaan input pendidikan serta pengendalian terhadap proses pendidikan melalui manajemen guru, produktivitas sekolah yang baik diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran serta penyusunan instrumen akreditasi berdasarkan pada Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, Lestari and Puspaningrum, 2021).

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Juga untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah yang diakreditasi meliputi SD, SDLB, SLTP, SMA, dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya akreditasi sekolah bagi upaya peningkatan produktivitas sekolah serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. Hal inilah yang menjadi keprihatinan, maka pada tulisan ini penulis akan mempelajari tentang akreditasi dalam meningkatkan mutu sebuah sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis kritis dan metode kepastakaan. Metode analisis kritis yang penulis maksudkan di sini adalah upaya menyeleksi dengan cara merangkum dan mempertimbangkan masalah sehingga dapat direduksi, direposisi, dan dipaparkan secara sistematis, (Awaludin, 2017). Studi Literasi (Library Reserch) dimana mengumpulkan data melalui literature yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas, seperti artikel jurnal, web, Koran dan lain sebagainya dan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat data pustaka serta mengolah bahan penelitian untuk dijadikan sebagai temuan hasil penelitian dan bautkan kesimpulan, (Mustika, 2008).

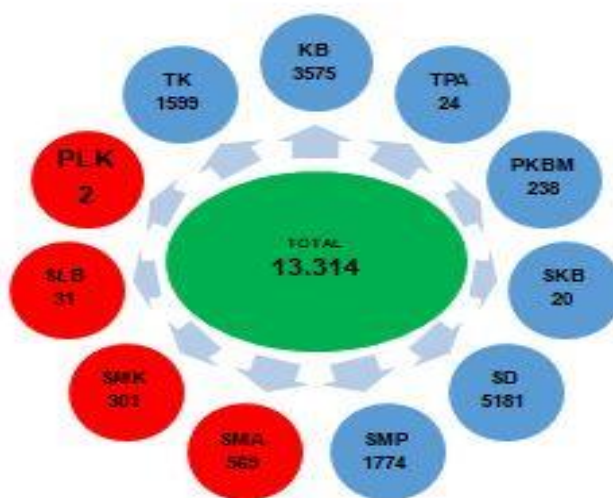
HASIL DAN PEMBAHASAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif. Tolok ukur atau parameter mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah standar nasional pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Menteri Pendidikan Nasional, 2005). SNP meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pendidikan di NTT dilihat dari Jumlah satuan Pendidikan antara Kuantitas dan Kualitas Sekolah-sekolah yang tersebar di NTT

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di NTT, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah. Hal ini tertuang dalam visi Pembangunan NTT yakni NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI, dimana bangkit diukur dari, *Pertama* kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemampuan berusaha, serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT, *kedua*, mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Berikut adalah sejahtera diukur dari *Pertama*, terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, *kedua*, tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan. Hal demikian didukung dengan melihat banyaknya lembaga pendidikan sekolah yang tersebar di NTT seperti dibawah ini.

KELOMPOK/ JENJANG	JUMLAH
TK	1599
KB	3575
TPA	24
PKBM	238
SKB	20
SD	5181
SMP	1774
SMA	569
SMK	301
SLB	31
PLK	2
TOTAL	13314



Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/240000> 25 April 2021

Dalam perspektif kuantitas sesungguhnya satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur begitu banyak, baik negeri yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang dimiliki oleh yayasan. Namun, menariknya adalah apakah secara kuantitas itu seimbang dengan kualitas sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Melihat dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur sebanyak 13.314 sekolah, dimana TK, 1.599, KB 3.575, TPA 24, PKBM 238, SKB 20, SD 5181, SMP 1774, SMA 569, SMK 301, SLB 31, dan PLK 2. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan kita begitu banyak secara kuantitas, namun secara kuantitas ini juga, memberikan keterangan bahwa masih banyak sekolah yang masih jauh dari kata kualitasnya.

Hal yang ingin disoroti dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTT dengan memperhatikan beberapa poin penting dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

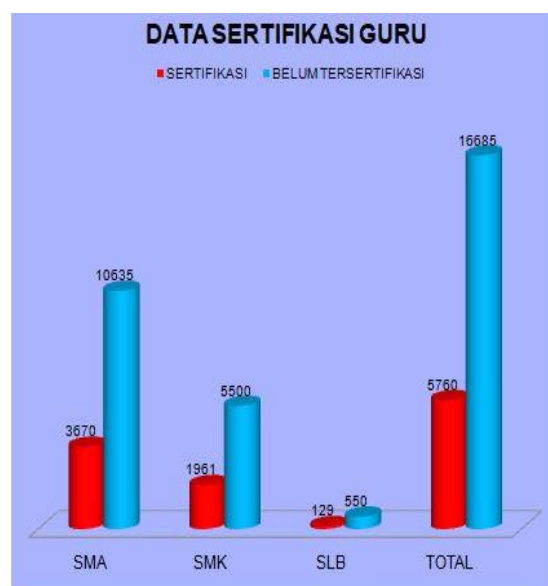
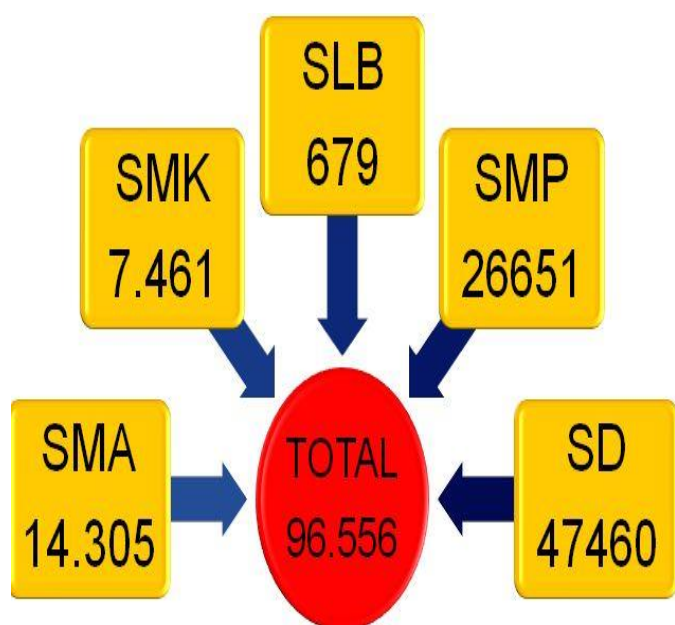
Pertama, Sarana dan prasarana Pendidikan, merupakan faktor pendukung yang memungkinkan warga sekolah berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan bisa disebut dengan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah merupakan suatu usaha yang mencerminkan pelaksanaan kurikulum secara lancar sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dan latihan keterampilan kejuruan yang memadai (Asopwan, 2018). Dengan demikian persoalan-persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di NTT terkait sarana dan prasarana yang perlu ditangani dengan baik, diantaranya adalah Sarana dan prasarana, yaitu: Kekurangan sarana penunjang seperti perpustakaan, ruang serba guna, laboratorium, dan ruang olahraga; Gedung-gedung sekolah perlu mendapat perbaikan dengan segera karena sebagian besar kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar; Kekurangan buku-buku penunjang kelancaran proses belajar mengajar sehingga peserta didik kurang mendapatkan buku-buku sebagai bahan referensi.

Kedua, Tatakelola Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pengelolaan sekolah masih belum optimal dimana masih terdapat kekurangan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sekolah yang bermutu tinggi.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pendidikan di NTT dilihat dari banyak jumlah Pendidik yang tersebar di NTT

Dalam upaya memajukan kehidupan suatu bangsa dan Negara, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, maka di dalamnya terjadi proses pendidikan atau proses belajar yang memberikan pengertian, pandangan dan penyusaian bagi

seseorang atau peserta didik kearah kedewasaan dan kematangan berpikir. Proses tersebut akan membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang anak didik atau peserta didik, dan atau subjek didik kearah yang lebih dinamis, baik terhadap bakat atau pengalaman, moral, intelektual maupun fisik (jasmani) menuju kedewasaan dan kematangan, (Anwar, 2015). Disinilah peran guru di dalam raung-runag kelas dengan memfasilitasi, menyediakan kondidisi belajar yang optimal untuk membelajarkan siswa dengan proses belajar mengajar. Kondisi belar mengajar optimal dicapai jika guru mampu mengatur siswa, sarana pengajaran memadai dan situasi belajar menyenangkan dengan berpedoman pada ajuan yang termuat dalam perangkat pembelajaran. Dengan demikian dapat dilihat jumlah pendidik yang tersebar di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:



Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/240000> 25 April 2021

Guru sebagai ujung tombak pembangunan sebuah bangsa, sebab dari rahim gurulah sebuah kehidupan dan masa depan dilahirkan. Dalam hal ini jika terjadi kegagalan seorang guru mencapai tujuan pemebelajaran maka terjadi berbanding lurus dengan ketidakmampuan guru mengelolah kelas. Indikator dari kegagalan itu sperti prestasi belajar siswa rendah, tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang ditentukan, karena itu pengelolaan kelas merupakan komptensi guru yang sanagt penting. Berdasarkan data guru yang tersebar di Provinsi NTT di atas merupakan ujung tombak bagi perubahan provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak yang harus dilakuakn oleh seorang guru bagi terciptanya suasana pembelajaran mengajar yang efektif dan menyenangkan, (Ismaya, 2015). Maka dari itu pentingnya kemampuan guru dalam pengelolaan kelas guna menciptakan suasana kelas yang konodusif demi mengangkat kulitas pembelajaran siswa di NTT. Pada tataran ini Pendidikan di NTT masih mengalami tantangan dimana berdasarkan jumlah guru 96.556 yang tersebar di sekolah SD maupun SMA tersebut masih banyak yang belum tersertifikasi guru. Dan inilah tantangn yang dihadapi saat ini. Pendidkan di NTT butuh tenaga pendidik yang mampu menguasai 4 kompetensi yakni kepribadian, pedagogik, profesionalime dan sosial. Hal itu dibutuhkan untuk

meningkatkan prestasi siswa dalam mendongkrak mutu pendidikan kita di NTT ke tingkat nasional.

Hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah dalam rangka bagaimana meliahat Guru-guru yang ada tersebar di NTT baik negeri maupun swasta sebagai jalan keluar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan beberapa poin penting sebagai berikut:

Pemerintah diharapkan fokus pada kualitas pendidikan dan akses pendidikan yang berkeadilan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, dengan catatan perbaikan dan perhatian atas terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah-daerah. rendahnya kualitas tenaga pendidik, rendahnya kualitas pengelolaan sistem pendidikan, terbatasnya biaya pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, pembangunan pendidikan Provinsi NTT diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Rasio Guru terhadap Murid. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur tertentu. Nilai APS yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Anak usia sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (98,27 persen) dan 13-15 tahun (94,76 persen) hampir seluruhnya telah bersekolah atau mengakses fasilitas pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Sementara pada kelompok Umur 16-18 tahun (74,65persen), akses fasilitas pendidikan relatif rendah. Secara rata-rata hanya 3 dan 4 penduduk berumur 16-18 tahun yang sementara bersekolah, sisanya memilih untuk tidak bersekolah, (Kennedy et al., 2019). Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kualitas lulusan maka perlu penguatan terhadap peran dari seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik untuk mencedaskan generasi bangsa. Sebab provinsi NTT secara kualitas tingkat nasional, mutu pendidikan kita masih berada di peringkat bawah. Fokus kedepan adalah memperhatikan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan berkeadilan bagi negeri maupun swasta.

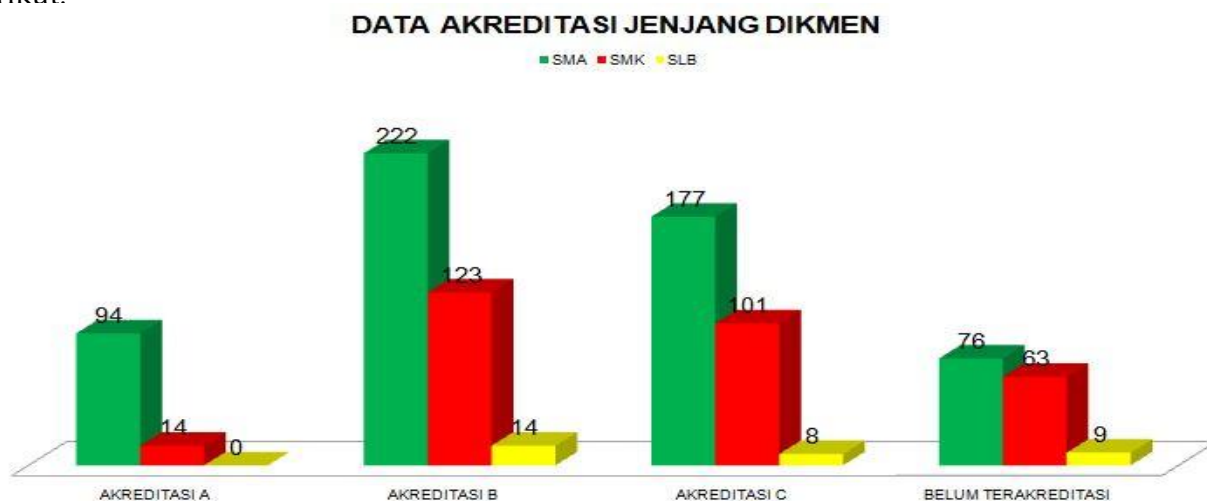
Sebaran kualitas mutu satuan pendidikan diwilayah Nusa Tenggara Timur baik negeri maupun swasta dilihat dari hasil Akreditasi Sekolah

Mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran masyarakat. Dengan demikian dalam kaitannya dengan standarisasi, akreditasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperoleh informasi tentang kondisi nyata suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar minimal yang telah ditetapkan menuju perencanaan pendidikan yang terarah guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Akreditasi merupakan suatu bentuk usaha mempercepat dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sekolah.

Dalam Accreditation Handbook (COA, 2008, p. 3), akreditasi didefinisikan sebagai proses verifikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga independen terhadap program melalui penilaian secara menyeluruh apakah menunjukkan telah memenuhi atau melebihi standar umum dan standar program yang ditetapkan. Program yang

akreditasi yang dinilai efektif dalam mempersiapkan pendidik dan menunjukkan mutu secara keseluruhan terhadap program-program umum yang ditetapkan. Status akreditasi dapat dicapai meskipun tidak semua standar dipenuhi. ECA (2005, p. 4) mendefinisikan akreditasi sebagai suatu keputusan mandiri dan formal yang diperoleh dari suatu lembaga mandiri berdasarkan standar tertentu. Proses akreditasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari penilaian diri (selfassessment), penyiapan berbagai dokumen yang perlu diajukan menjalani akreditasi, penilaian eksternal oleh tim asesmen yang independen, dan penetapan keputusan akreditasi. Keputusan akreditasi tergantung pada penilaian mutu berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Keputusan akhir dari sebuah proses atau prosedur akreditasi yang berwibawa perlu dilakukan secara wajar meskipun diakui bahwa validitas terhadap hasil penilaian itu masih terbatas.

Oleh karena itu dalam peningkatan mutu kompetensi lulusan, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terpadu melalui peningkatan komponen standar pendidikan nasional. Kegiatan sistemik dan terpadu dalam upaya pemenuhan standar-standar mutu pendidikan disebut penjaminan mutu pendidikan dan dapat diperoleh hasil akreditasi sebagai wujud dari laporan mutu lembaga pendidikan di NTT sebagai berikut.



Nasional) <https://dapo.kemdikbud.go.id/> Update 28/01/2021

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi sekolah juga diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita dilihat dari data hasil akreditasi masih jauh dari predikat mutu berdasarkan harapan masyarakat

NTT. Dalam hal ini hal yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki mutu pendidikan di NTT sebagai berikut:

Pertama, Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, *Kedua*, Tenaga pendidik, yaitu: Kekurangan guru yang berkualitas untuk tiap mata pelajaran; Kualitas guru belum memadai, *Ketiga*, Sarana dan prasarana, yaitu: Kekurangan sarana penunjang seperti perpustakaan, ruang serba guna, laboratorium, dan ruang olahraga; Gedung-gedung sekolah perlu mendapat perbaikan dengan segera karena sebagian besar kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar; Kekurangan buku-buku penunjang kelancaran proses belajar mengajar sehingga peserta didik kurang mendapatkan buku-buku sebagai bahan referensi., *Keempat*, kurangnya kemampuan dalam kompetensi siswa di bidang matematika, sains dan literasi; *Kelima*, Manajemen sekolah, yaitu: Pengelolaan sekolah masih belum optimal; dan Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam dan *Keenam*, Peran serta masyarakat, yaitu belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan partisipasi untuk meningkatkan kinerja sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan serta meningkatkan kinerja sekolah terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Akreditasi Sekolah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, serta memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi. Dalam pengembangan pendidikan di wilayah NTT, perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu dengan melihat beberapa faktor yang mejadi prioritas utama yaitu: efektivitas proses belajar mengajar yang pada kenyataannya sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang belum memadai, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, metode pengajaran serta manajemen pendidikan; peran orang tua, masyarakat dan pemerintah yang mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu perlu ditingkatkan lagi agar mutu itu tidak sekedar manis di bibir, pahit direalisasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya Ucapkan terimakasih kepada teman teman yang telah yang telah berkontribusi dan memberikan motivasi sehingganya artikel ini telah terbit. Kepada Editorial team Attractive Journal: Innovative Education Journal yang telah membantu dalam proses review, sehingganya artikel ini layak untuk dipublikasikan

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI

Penelitian ini dilakukan oleh Amirulah Datuk (AD). AD telah melakukan penelitian dan mengolah data, dan kemudian menyelesaikan proses revisi dalam penyempurnaan naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad. 2015. Filsafat Pendidikan. Prenadamedia Group. Makasar
- A. R. Awaludin, "Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Susunan Artikel Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, Pp. 12 - 21, 2017.
- Asopwan, D., 2018. Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah 2, 8.
- Awaludin, A.A.R., 2017. Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. SAP Susunan Artik. Pendidik. 2. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- COA. (2008). Accreditation handbook: definition of stipulations 2007-08. Retrieved July 19, 2008, from https://www.ctc.ca.gov/docs/defaultsource/educator-prep/coaagendas/2008-05/2008-05-item16.pdf?sfvrsn=ba0760a2_0
- Datuk, A., 2020. Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang. *Attract. Innov. Educ. J.* 2, 20. <https://doi.org/10.51278/aj.v2i2.40>
- ECA. (2005). Accreditation in the European higher education area. Retrieved July 19, 2008, from http://www.aic.lv/bologna/Bologna/contrib/Statem_oth/ECA_on_Bergen.pdf
- Ismaya, Bambang. 2015. Pengelolaan Pendidikan. PT Refika Aditama. Bandung
- Kennedy, P.S.J., Tobing, S.J.L., Toruan, R.L., Nomleni, A., 2019. ISU STRATEGIS KESENJANGAN PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2, 11.
- Lestari, F., Puspaningrum, A.S., n.d. PENGEMBANGAN DENAH SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN NILAI AKREDITASI PADA SMA TUNAS MEKAR INDONESIA 2, 11.
- Mulyasa (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mustika, Z. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Saad, S.R., 2020. Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Muhammadiyah Lakea 15, 4.
- Soetjipto (2004) *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab II pasal 3 tentang Sisdiknas
- WASIUDIN AA. *Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam (Studi Kasus MI Raudhatul Athfal Meruyung)*. FITK: UIN JKT;

Copyright Holder :

© Amirulah Datuk, et al., (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

